

JANUARI 2023

**LAPORAN  
TAHUN  
2022**

**LAPORAN PELAYANAN  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
PPID BPSDM PROVINSI DKI  
JAKARTA TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang di susun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai mekanisme penyusunan laporan pada Surat Edaran Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta nomor 001/KIP-DKI/SE/I/2023 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini yaitu sebagai dokumen Laporan Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi, komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, rincian pelayanan informasi publik jenis respon, media respon, kendala/hambatan, yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan kami juga sadar sepenuh hati jika dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih banyak kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan di masa yang akan datang sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan informasi publik

Jakarta, 30 Januari 2023

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi DKI Jakarta  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

TTD

Muhamad Arif Amien  
NIP 197007051997031004

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar.....  | i  |
| Daftar Isi.....  | ii |
| I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....  | 1  |
| 1.1 Kebijakan Umum Layanan Publik implementasi regulasi Keterbukaan.   | 1  |
| 1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi.....   | 2  |
| 1.3 Alur Permohonan Informasi melalui PPID.....  | 2  |
| II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....  | 3  |
| 2.1. Saranan dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....  | 3  |
| 2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.....                  | 4  |
| 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan penggunaannya.....   | 5  |
| III Rincian Pelayanan Informasi Publik .....   | 5  |
| 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik.....  | 6  |
| 3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu..... | 6  |
| 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik sebagian atau Seluruhnya.....                    | 6  |
| 3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya  | 6  |
| IV Jumlah keberatan yang diterima .....  | 6  |
| V. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....                            | 6  |
| 5.1 Kendala Eksternal.....   | 6  |
| 5.2 Kendala Internal.....  | 6  |
| VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....  | 7  |
| 6.1 Rekomendasi.....   | 7  |
| 6.2 Rencana Tindak Lanjut.....   | 8  |
| VII. Saran dan Kesimpulan.....   | 9  |
| XIII Lampiran.....   | 11 |

## **A. I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **1.1 Kebijakan Umum Layanan Publik**

implementasi regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia yang telah terus mendorong dan menuntut instansi pemerintah untuk terus berbenah diri, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terbuka, dan partisipatif. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan instansi pemerintahan sebagai Badan Publik termasuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta memenuhi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh akses informasi publik. Hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi pun diatur dalam Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bagi instansi pemerintah, memberikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pengelola Informasi dan Dokumentasi menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap transparan dan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta memberikan layanan informasi melalui berbagai medium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.2 Kebijakan Bada Publik Terhadap Layanan Informasi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan inforamasi publik melalui PPID. Penunjukan dan penetapan Sekretaris BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta nomor 152 tahun 2022 tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi permohonan informasi publik dapat disampaikan secara online melalui website pada link <https://bpsdm.jakarta.go.id/whistle-blower>

### 1.3 Alur Permohonan Informasi Melalui PPID



Semua indikator pengumuman dan penyediaan Informasi Publik serta SOP Layanan Informasi Publik BPSDM Provinsi DKI Jakarta tersedia pada laman <https://bpsdm.jakarta.go.id/ppid>.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan visi dan misi sebagai berikut:

#### Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

#### Misi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari: Ruang Desk/Meja loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon

informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

1. Kursi tamu;
2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
3. Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
4. 1 (satu) unit printer;
5. 1 (satu) unit lemari arsip; dan 7. 1 (satu) filling kabinet.

Sarana Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung dapat menuju ke meja layanan informasi, dan yang tidak langsung dapat mengunjungi Website resmi PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://bpsdm.jakarta.go.id/ppid> Website PPID memiliki 5 (lima) sub menu, yaitu: sub menu profil , sub menu layanan dan informasi publik, sub menu Regulasi, sub menu Struktur, dan Sub Menu Fungsi.

## **2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan tugas pelayanan Informasi publik dibantu oleh Sekretaris

BPSDM Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Anggota dan Pelaksana sebanyak 11 orang.

### **2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta belum mengakomodir anggaran kegiatan PPID. Diharapkan nantinya pada tahun anggaran 2024 BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan mencoba mengajukan anggaran secara khusus untuk menunjang layanan informasi publik melalui berbagai kegiatan PPID di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

## **III. Rincian Pelayanan Informasi Publik:**

### **3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Jumlah Permintaan Informasi Publik tertera pada Lampiran Laporan.

### **3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu**

Pelayanan PPID yang dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 2 jenis, yaitu langsung (tatap muka) dan tidak langsung (Permohonan informasi online, email, dll). Waktu penyelesaian pemenuhan informasi yang diminta berbeda antaran kedua jenis layanan tersebut.

Pelayanan informasi langsung dilaksanakan melalui ruang layanan PPID yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Waktu penyelesaian permohonan informasi pada jenis layanan ini lebih cepat dibanding layanan informasi tidak langsung. Rata-rata penyelesaian informasi dapat terselesaikan maksimal 3 jam setelah informasi tersebut diterima. Sedangkan untuk yang tidak langsung memerlukan paling lambat 1 hari kerja tergantung data yang diminta.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian dalam kecepatan pemenuhan permintaan informasi secara langsung. Rata-rata respon pertama dalam pemenuhan informasi selesai pada hari yang sama.

Contohnya, permohonan informasi A mengajukan informasi terkait persyaratan mengikuti seleksi Calon pegawai tugas belajar. Dari loket akan langsung mengarahkan ke bidang terkait untuk memberikan jawaban sehingga pada hari itu juga pemohon tersebut sudah bisa mendapatkan jawaban.

### **3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik sebagian atau Seluruhnya**

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, permintaan informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 15 permohonan.

### **3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya**

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Permintaan informasi yang ditolak tidak ada.

## **IV. Jumlah keberatan yang Diterima**

Pada Tahun 2022, tidak ada permohonan informasi yang mengajukan sengketa informasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

## **V. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **5.1 Kendala Eksternal**

Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terdapat hambatan dalam kaitanya dengan eksternal organisasi yaitu pemohon informasi tidak melakukan pencarian terlebih dahulu melalui website BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan sering terjadinya pemohon yang salah tujuan mencari informasi seperti ada yang menanyakan masalah sengketa tanah ke BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

### **5.2 Kendala Internal**

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitanya dengan internal organisasi di

antaranya:

1. Sumber Daya Manusia di BPSDM Provinsi yang sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Keterbatasan jumlah ini menjadi salah satu faktor penyebab koordinasi yang kurang dalam memberikan informasi pelayanan.
  2. Sosialisasi standar layanan PPID di lingkungan BPSDM Provinsi DKI belum berjalan dengan lancar.
  3. Belum tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan PPID di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik**

### **6.1 Rekomendasi**

Berdasarkan penilaian dan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi publik pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan hal-hal berikut ini kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk dilengkapi:

| No | Indikator                   | Keterangan  |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | Pengumuman Informasi Publik | Belum mengumumkan informasi laporan keuangan Badan Publik Tahun 2021 berupa lampiran bukti laporan yang sudah di audit            |
|    |                             | Belum menginformasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021-2022   |
| 2  | Penyediaan Informasi Publik | Belum Menyediakan dokumen laporan keuangan Bdan Publik yang telah diaudit dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 |
|    |                             | Belum menyediakan laporan tentang data aset/ Barang Milik Negara  |
|    |                             | Belum menyediakan informasi laporan akses Informasi Publik Badan Publik Tahun 2021  |
|    |                             | Belum Membuat ringkasan permohonan & keberatan informasi publik tahun 2021-   |

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
|   |                               | 2022   |
| 3 | SOP Layanan Informasi Publik. | Belum Memiliki SOP Daftar Informasi Publik (DIP)   |
|   |                               | Belum Memiliki SOP Daftar Informasi Dikecualikan   |
|   |                               | Mesti terdapat Standar biaya dalam Layanan Informasi   |
| 4 | Pengembangan IT               | Belum Memiliki website atau menu khusus PPID   |
|   |                               | Belum Memiliki menu / tools yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online |

## 6.2 Rencana Rindak Lanjut

| No | Indikator                     | Tindak Lanjut   |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | Pengumuman Informasi Publik   | Telah mengumumkan informasi laporan keuangan Badan Publik Tahun 2021 berupa lampiran bukti laporan yang sudah di audit            |
|    |                               | Telah menginformasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021-2022   |
| 2  | Penyediaan Informasi Publik   | Telah Menyediakan dokumen laporan keuangan Bdan Publik yang telah diaudit dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 |
|    |                               | Telah menyediakan laporan tentang data aset/ Barang Milik Negara  |
|    |                               | Telah menyediakan informasi laporan akses Informasi Publik Badan Publik Tahun 2021  |
|    |                               | Telah Membuat ringkasan permohonan & keberatan informasi publik tahun 2021-2022   |
| 3  | SOP Layanan Informasi Publik. | Telah Memiliki SOP Daftar Informasi Publik (DIP)  |
|    |                               | Telah Memiliki SOP Daftar Informasi   |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
|   |                 | Dikecualikan   |
|   |                 | Telah membuat Standar biaya dalam Layanan Informasi  |
| 4 | Pengembangan IT | Telah Memiliki website atau menu khusus PPID   |
|   |                 | Belum Memiliki menu / tools yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online |

Selain hal tersebut di atas, terdapat rencana tindak lanjut pelaksanaa pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang untuk meningkatkan kualaitan pelayanan dan keterbukaan informasi publik diantaranya:

1. Akan melaksanakan rapat koordinasi internal untuk menyatukan persepsi dalam memberikan layanan informasi publik.
2. Akan selalu memberikan jawaban yang cepat, tepat dan akurat baik dari permohonan langsung dan tidak langsung.

## **7. Saran dan Kesimpulan**

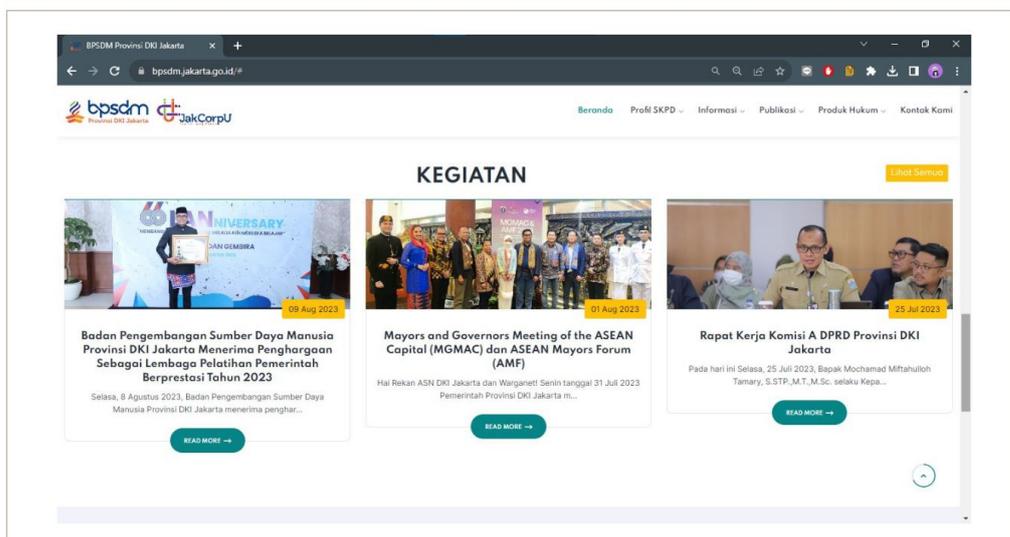
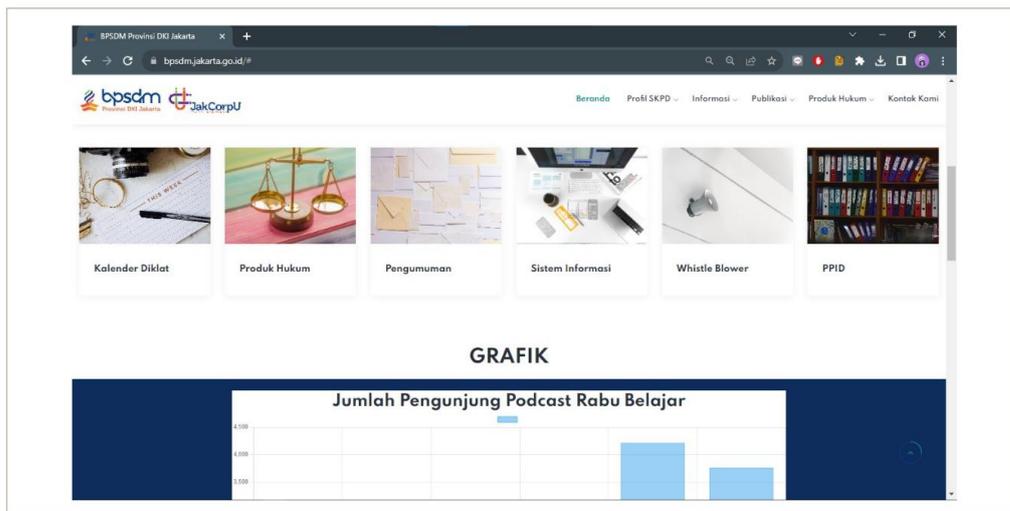
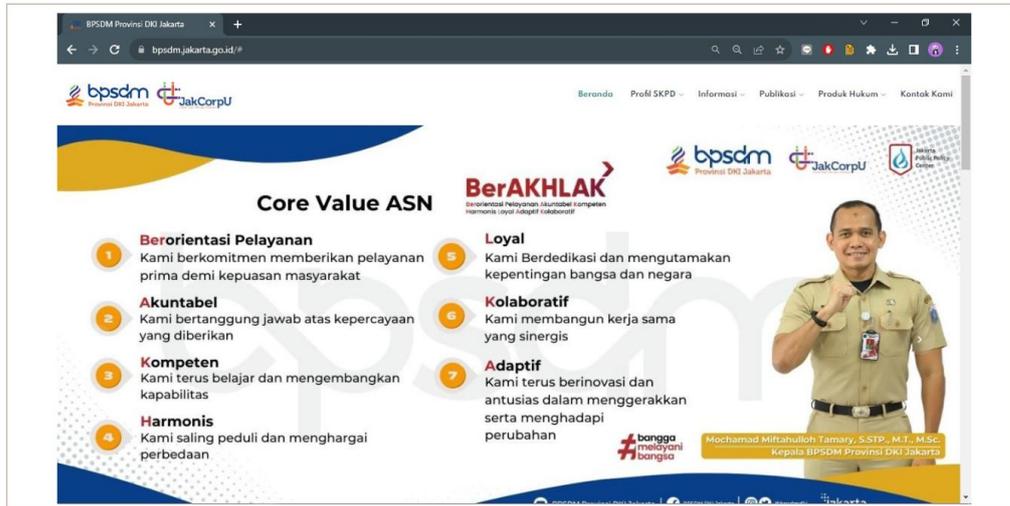
PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengelola dan melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan melakukan koordinasi serta mengikuti bimbingan teknis dengan PPID Provinsi DKI jakarta untuk dapat melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan uraian dari laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di

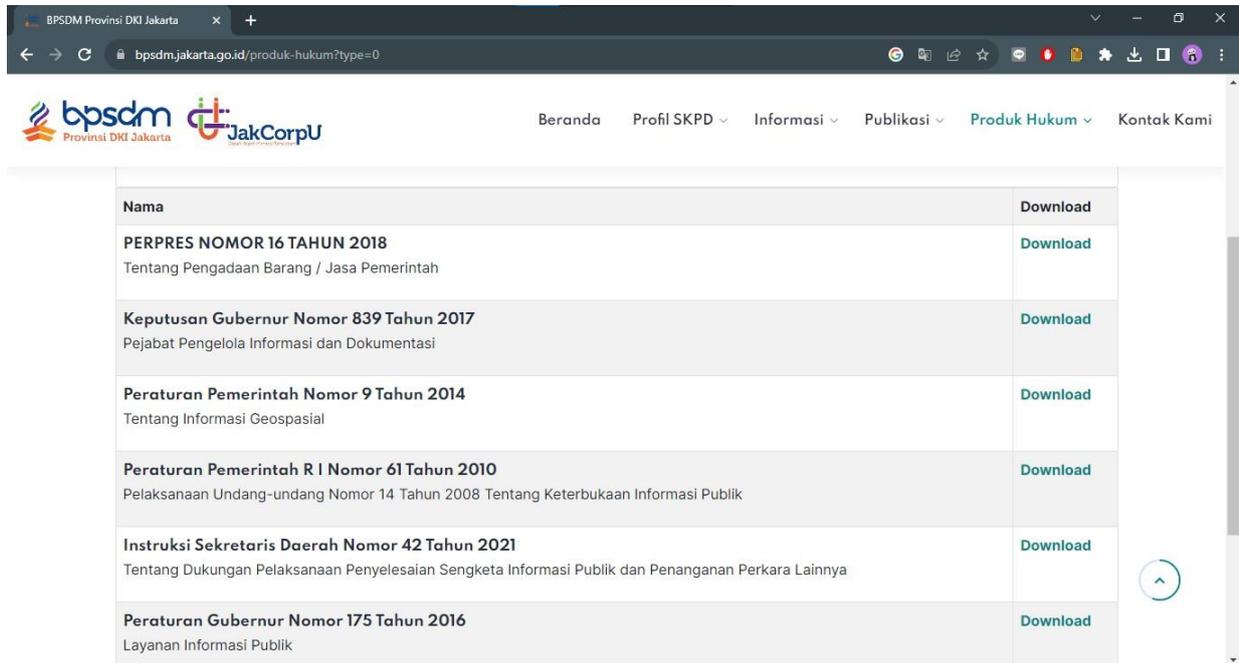
PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta masih perlu perbaikan sehingga BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkatkan pelayanan dan dokumentasi.

# Lampiran Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan sosial media

## 1. Website/Situs/Portal Resmi (utama)



## 2. Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik Yang Dapat Di Unduh



| Nama   | Download                 |
|--|--------------------------|
| <b>PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018</b><br>Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah   | <a href="#">Download</a> |
| <b>Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017</b><br>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  | <a href="#">Download</a> |
| <b>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014</b><br>Tentang Informasi Geospasial   | <a href="#">Download</a> |
| <b>Peraturan Pemerintah R I Nomor 61 Tahun 2010</b><br>Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik                    | <a href="#">Download</a> |
| <b>Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 42 Tahun 2021</b><br>Tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya | <a href="#">Download</a> |
| <b>Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016</b><br>Layanan Informasi Publik   | <a href="#">Download</a> |

1. Standar biaya Layanan Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
2. Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
3. Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi [ [Lihat](#) ]
4. Alur Mekanisme Pengujian Konsekuensi Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
5. Alur Mekanisme Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi [ [Lihat](#) ]
6. Alur Mekanisme Pengajuan Dokumentasi Dan Pengarsipan PPID [ [Lihat](#) ]
7. Alur Mekanisme Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ [Lihat](#) ]
8. Alur Mekanisme Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
9. Alur Mekanisme Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [ [Lihat](#) ]

#### SOP PPID

1. Daftar Informasi Publik [ [Download](#) ]
2. Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ [Download](#) ]

#### Rencana Kerja

1. Rencana Kerja Tahunan 2020 [ [Download](#) ]
2. Rencana Kerja Tahunan 2021 [ [Download](#) ]
3. Rencana Kerja Tahunan 2022 [ [Download](#) ]
4. Rencana Kerja Tahunan 2023 [ [Download](#) ]

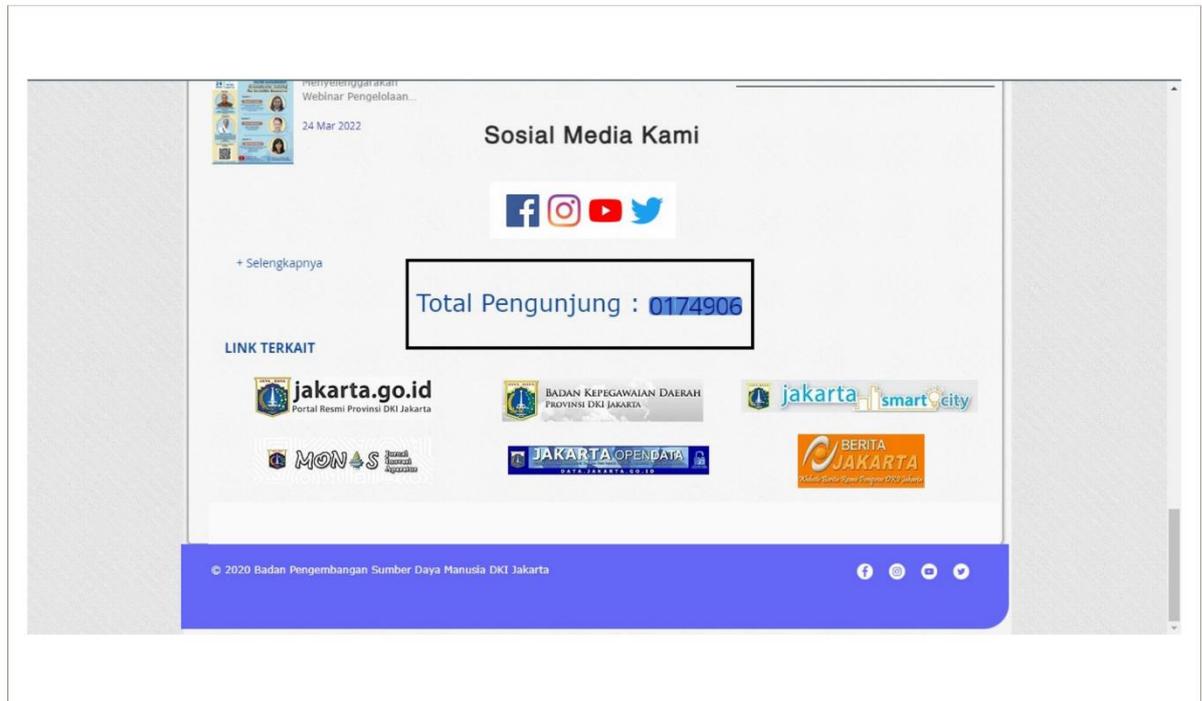
#### Laporan

1. Laporan Keuangan 2020 [ [Download](#) ]
2. Laporan Keuangan 2021 [ [Download](#) ]
3. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2021 [ [Download](#) ]
4. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2022 [ [Download](#) ]
5. Laporan Data Aset BPSDM Provinsi DKI Jakarta [ [Download](#) ]
6. Laporan Kerja Instansi Pemerintah BPSDM Tahun 2022 [ [Download](#) ]

#### Bukti LHKPN Pejabat BPSDM Provinsi DKI Jakarta

1. LHKPN 1 [ [Download](#) ]
2. LHKPN 2 [ [Download](#) ]

### 3. Rekap Jumlah Pengunjung/ Viewers Website



### 4. Rekap jumlah pengunduh/ downloader dokumen publik terkait informasi publik

Beranda Profil SKPD Informasi F

1. Standar biaya Layanan informasi publik [ [Lihat](#) ]
2. Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
3. Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi [ [Lihat](#) ]
4. Alur Mekanisme Pengujian Konsekuensi Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
5. Alur Mekanisme Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi [ [Lihat](#) ]
6. Alur Mekanisme Pengajuan Dokumentasi Dan Pengarsipan PPIID [ [Lihat](#) ]
7. Alur Mekanisme Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ [Lihat](#) ]
8. Alur Mekanisme Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik [ [Lihat](#) ]
9. Alur Mekanisme Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [ [Lihat](#) ]

**SOP PPIID**

1. Daftar Informasi Publik [ [Download](#) ]
2. Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ [Download](#) ]

**Rencana Kerja**

1. Rencana Kerja Tahunan 2020 [ [Download](#) ]
2. Rencana Kerja Tahunan 2021 [ [Download](#) ]
3. Rencana Kerja Tahunan 2022 [ [Download](#) ]
4. Rencana Kerja Tahunan 2023 [ [Download](#) ]

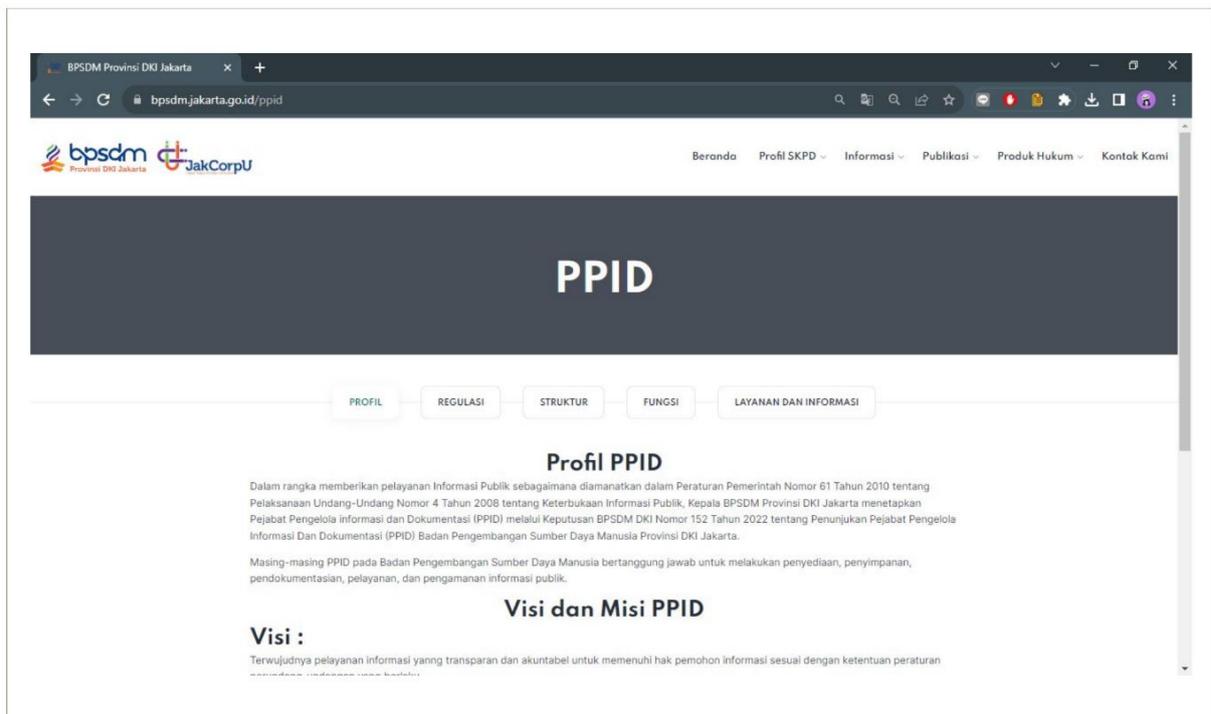
**Laporan**

1. Laporan Keuangan 2020 [ [Download](#) ]
2. Laporan Keuangan 2021 [ [Download](#) ]
3. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2021 [ [Download](#) ]
4. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2022 [ [Download](#) ]
5. Laporan Data Aset BPSDM Provinsi DKI Jakarta [ [Download](#) ]
6. Laporan Kerja Instansi Pemerintah BPSDM Tahun 2022 [ [Download](#) ]

**Bukti LHKPN Pejabat BPSDM Provinsi DKI Jakarta**

1. LHKPN 1 [ [Download](#) ]
2. LHKPN 2 [ [Download](#) ]

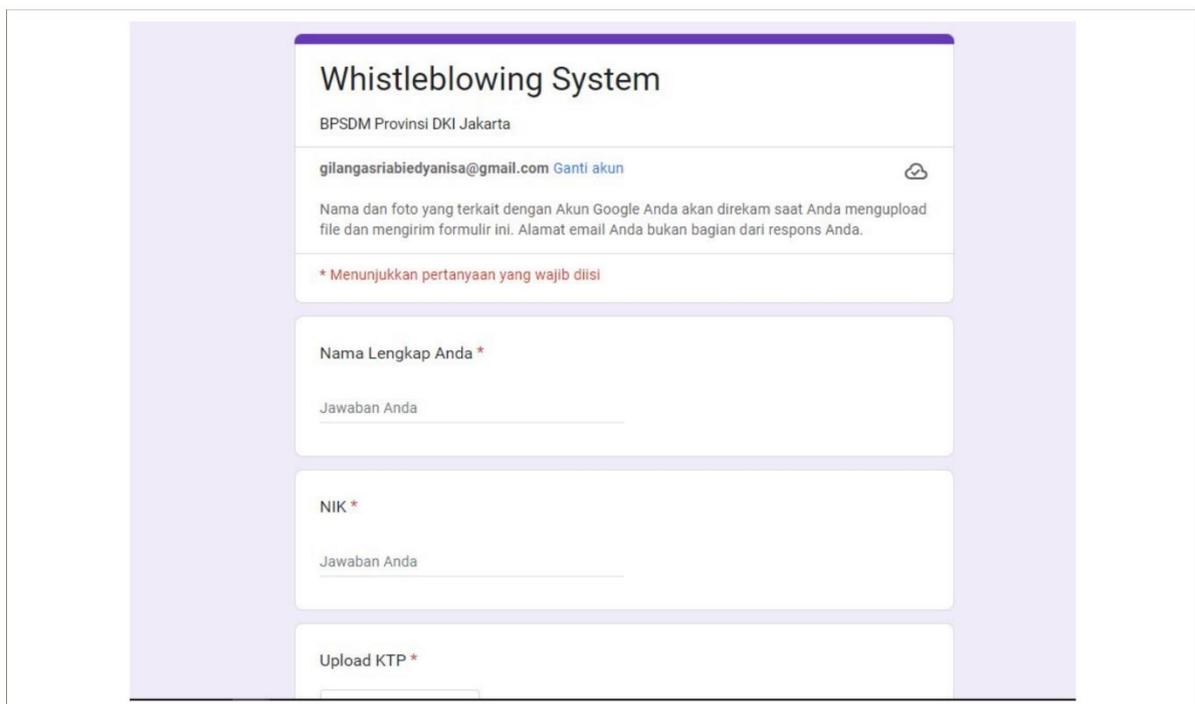
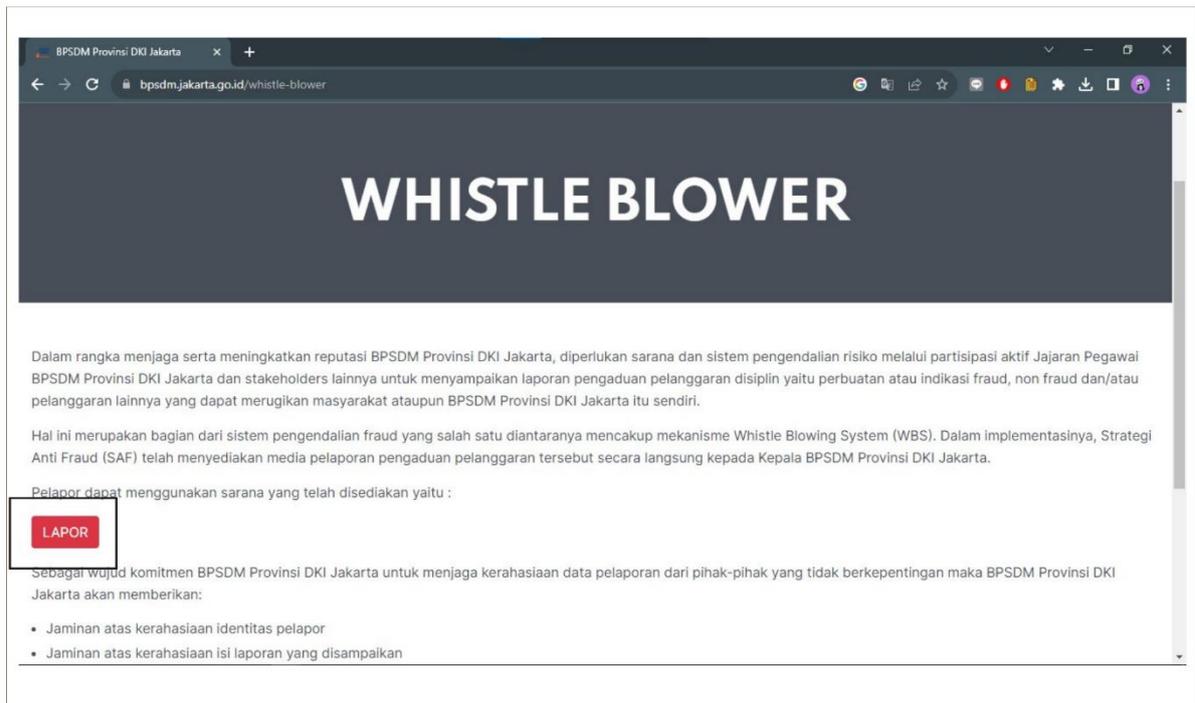
## 5. website atau menu khusus PPID



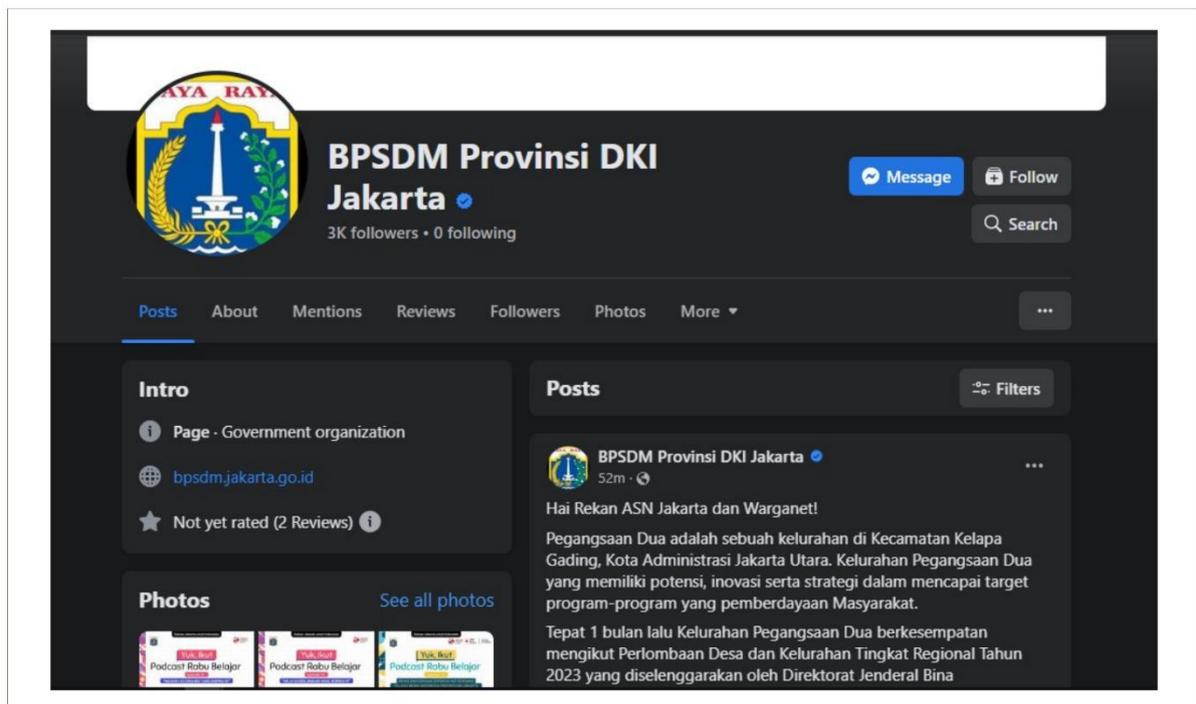
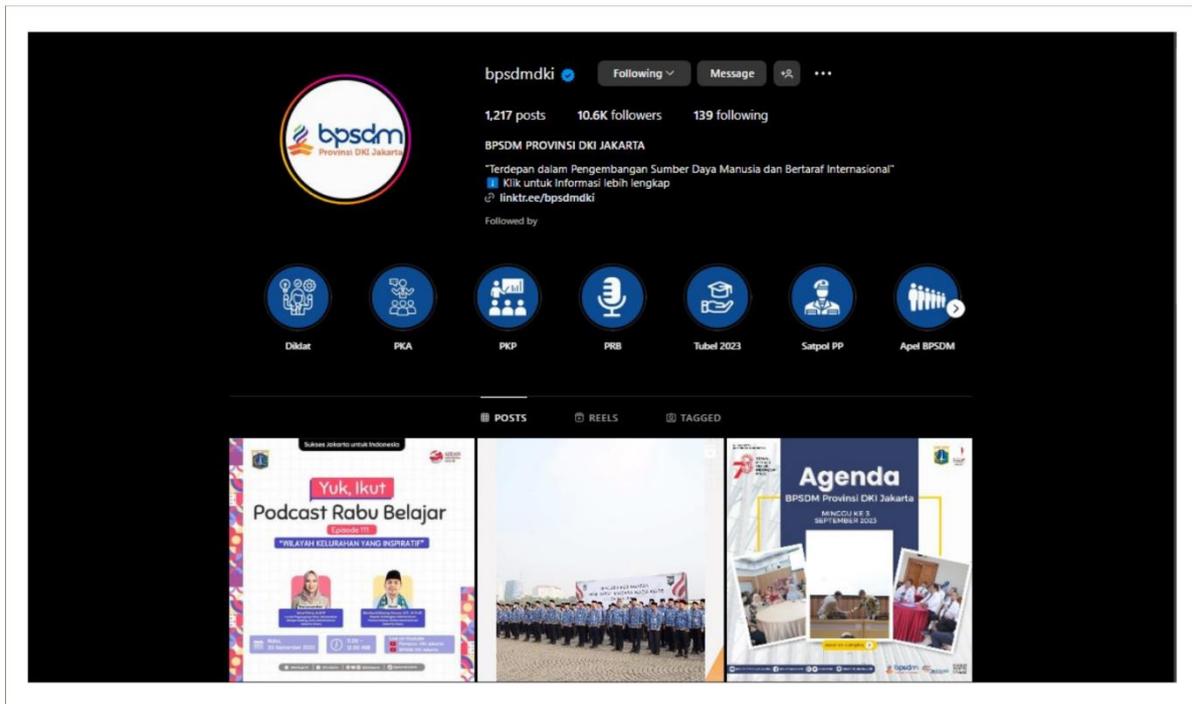
## 6. Kelengkapan Profil PPID sesuai dengan SK



7. Website/Situs// Portal PPID memiliki menu/ tools menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online:



## 8. Akun Media Sosial BPSDM Provinsi DKI Jakarta



Telusuri



## BPSDM DKI JAKARTA

@bpsdmdkjakarta 14 rb subscriber 266 video

Akun Resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta >

[bpsdm.jakarta.go.id](https://bpsdm.jakarta.go.id) dan 3 link lainnya

Subscribe

BERANDA
VIDEO
LIVE
PLAYLIST
KOMUNITAS
CHANNEL
TENTANG

### Deskripsi

Akun Resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta  
Channel ini dikelola oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta  
Memberikan Konten-konten Edutainment

### Detail

Untuk pertanyaan bisnis: [Lihat alamat email](#)

Lokasi: Indonesia

### Statistik

Bergabung pada 10 Apr 2019

1.106.587 x ditonton

Telusuri



## BPSDM DKI JAKARTA

@bpsdmdkjakarta 14,2 rb subscriber 267 video

Akun Resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta >

[bpsdm.jakarta.go.id](https://bpsdm.jakarta.go.id) dan 3 link lainnya

Disubscribe

BERANDA
VIDEO
LIVE
PLAYLIST
KOMUNITAS
CHANNEL
TENTANG

Ayo Laporkan Pengembangan Kompetensi!



2.01

### Tutorial Pelaporan Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai

BPSDM DKI JAKARTA · 12 rb x ditonton · 4 tahun yang lalu

Video ini Berisikan Tutorial Pelaporan Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai DKI Jakarta

Video populer ▶ Putar semua



5.05

Microlearning-Aparatur Sipil Negara-Budi Sukmajadi

39 rb x ditonton · 3 tahun yang lalu



6.59

Micro Learning-Sistem Merit- Abdul Khalik

28 rb x ditonton · 3 tahun yang lalu



4.33

Micro Learning-Fungsi dan Peran Aparatur Sipil Negara...

27 rb x ditonton · 3 tahun yang lalu



3.23

Microlearning Swakelola - Pengertian Oleh Nur Basuki

22 rb x ditonton · 3 tahun yang lalu



9.58

Micro Learning-Pengadaan Barang Jasa Pemerintah-...

20 rb x ditonton · 3 tahun yang lalu



17.58

Micro Learning-Pengadaan Barang Jasa Pemerintah-...

18 rb x ditonton · 3 tahun yang lalu

Jadwal Diklat Perbulan 2019 ▶ Putar semua



1.45



1.56



1.01



1.30



1.52



1.30

## 9. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi



## 10. Loker Penerimaan Layanan Informasi dan Sarana Prasarana





## 11. Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

| Bulan        | Permohonan Informasi |             |                | Mekanisme Permohonan |                | Jenis Informasi yang diminta |                 |               |                           |           | Pelayanan Permohonan Informasi |            |              |                |                        | Sengketa Informasi |
|--------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------|
|              | Individu             | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung             | Tidak Langsung | Laporan Keuangan             | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan | Lain-lain | Dikabulkan                     |            | Ditolak      |                |                        |                    |
|              |                      |             |                |                      |                |                              |                 |               |                           |           | Sebagian                       | Seluruhnya | Dikecualikan | Tidak dikuasai | Belum Didokumentasikan |                    |
| Januari      |                      |             |                |                      |                |                              |                 |               |                           |           |                                |            |              |                |                        |                    |
| Februari     |                      | 1           |                | 1                    |                | 1                            |                 |               |                           |           |                                | 1          |              |                |                        |                    |
| Maret        |                      | 1           |                | 1                    |                |                              | 1               |               |                           |           |                                | 1          |              |                |                        |                    |
| April        |                      | 1           |                | 1                    |                |                              |                 |               | 1                         |           |                                | 1          |              |                |                        |                    |
| Mei          | 1                    |             |                |                      | 1              |                              |                 |               |                           | 1         |                                | 1          |              |                |                        |                    |
| Juni         | 1                    |             |                |                      | 1              |                              |                 |               |                           | 1         |                                | 1          |              |                |                        |                    |
| Juli         | 2                    |             |                | 1                    | 1              |                              |                 |               |                           | 2         |                                | 2          |              |                |                        |                    |
| Agustus      | 6                    |             |                | 3                    | 3              |                              |                 |               |                           | 6         |                                | 6          |              |                |                        |                    |
| September    | 2                    |             |                | 1                    | 1              |                              |                 |               |                           | 2         |                                | 2          |              |                |                        |                    |
| Oktober      |                      |             |                |                      |                |                              |                 |               |                           |           |                                |            |              |                |                        |                    |
| November     |                      |             |                |                      |                |                              |                 |               |                           |           |                                |            |              |                |                        |                    |
| Desember     |                      |             |                |                      |                |                              |                 |               |                           |           |                                |            |              |                |                        |                    |
| <b>Total</b> | <b>12</b>            | <b>3</b>    |                | <b>5</b>             | <b>7</b>       | <b>1</b>                     | <b>1</b>        |               | <b>1</b>                  | <b>12</b> |                                | <b>15</b>  |              |                |                        |                    |